

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan global yang kompleks dan multidimensional. Di tingkat internasional, sampah plastik laut telah menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem laut, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Menurut *United Nations Environment Programme*, sekitar 11 juta ton sampah plastik memasuki laut setiap tahun, dan angka ini diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2040 jika tidak ada intervensi substansial (UNEP, 2022). Sampah laut, terutama plastik, mengancam keberlanjutan ekosistem laut, menurunkan produktivitas perikanan, serta mengganggu keseimbangan rantai makanan yang menopang kehidupan jutaan manusia di dunia.

Fenomena tersebut tidak hanya berdampak ekologis tetapi juga ekonomi. Misalnya, World Bank memperkirakan kerugian ekonomi global akibat sampah laut mencapai US\$ 6–19 miliar per tahun, terutama karena penurunan produktivitas sektor perikanan dan pariwisata. Situasi ini menuntut pengembangan sistem tata kelola yang bukan sekadar administratif, tetapi kolaboratif dan partisipatif, melibatkan multi-aktor untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai lebih dari 95.000 km, menjadikannya sangat rentan terhadap permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik. Mengacu pada data Kementerian Lingkungan Hidup, timbunan sampah Indonesia telah mencapai 56,6 juta ton pada tahun 2023, dengan capaian pengelolaan baru mencapai 39,01% atau 22,09 juta ton. Sisanya, sebesar 60,99% atau 34,54 juta ton sampah masih perlu pengelolaan yang lebih baik (KoranJakarta, 2025).

Di samping itu, menurut data Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Laut (TKNPSL), jumlah sampah plastik yang masuk ke laut telah berkurang dari sekitar

615.675 ton pada 2018 menjadi 359.061 ton pada 2023, menandakan penurunan sekitar 41,68 % tetapi masih jauh dari target pengurangan 70 % pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (Antara, 2024).

Tabel 1.1 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia (2024)

Indikator	Jumlah (Ton/Tahun)	Persentase (%)
Timbulan Sampah Nasional	38,596,377.04	100%
Pengurangan Sambah	558,184.03	1.45%
Penanganan Sampah	12,665,693.97	32.82%
Sampah Terkelola	13,223,878.00	34.26%
Sampah Tidak terkelola	25,372,499.04	65.74%

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2026)

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun upaya pengelolaan sampah telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, proporsi sampah yang tertangani secara efektif masih relatif kecil, sehingga risiko aliran sampah menuju laut tetap tinggi.

Upaya pengelolaan sampah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan mulai dari tahap pengurangan hingga penanganan. Pada Pasal 3 dan 4, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas *tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi*, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

Selain itu, Pasal 5-10 menegaskan peran dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, memfasilitasi sarana-prasarana, dan mendorong riset serta inovasi teknologi daur ulang. Pemerintah daerah, di sisi lain, memiliki kewenangan menetapkan kebijakan lokal, mengelola fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta membina partisipasi masyarakat.

UU No. 18 Tahun 2008 juga menempatkan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai komponen penting dalam pengelolaan sampah (Pasal 11-16). Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sampah, serta kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Ketentuan ini menjadi pondasi konseptual yang sejalan dengan prinsip *collaborative governance* dalam ilmu administrasi publik, di mana keberhasilan kebijakan bergantung pada kolaborasi lintas aktor.

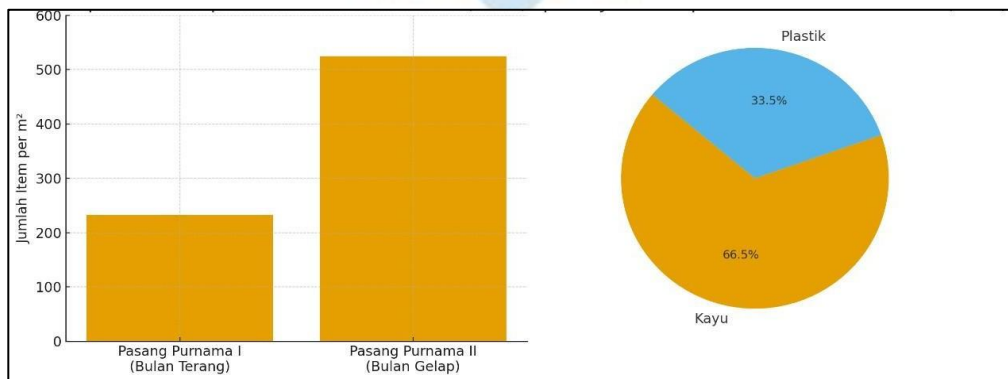
Sebagai implementasi dari mandat UU No. 18 Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) 2018-2025. Regulasi ini menargetkan pengurangan 70% sampah laut pada tahun 2025, dengan menekankan integrasi antara pengelolaan sampah darat dan laut. Implementasinya melibatkan 18 kementerian/lembaga melalui strategi perbaikan pengelolaan sampah darat, penguatan kesadaran publik, inovasi teknologi, dan penegakan hukum lingkungan.

Kehadiran Perpres ini menegaskan kesinambungan hierarki kebijakan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dari payung hukum UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur tata kelola sampah nasional, kemudian diterjemahkan dalam bentuk aksi spesifik melalui RAN PSL. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka yang jelas untuk mendukung kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan sampah, termasuk di kawasan pesisir seperti Pelabuhanratu.

Secara lokal, kawasan pesisir seperti Pelabuhanratu di Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah strategis baik secara ekonomi maupun ekologis. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pariwisata dan perikanan utama di Jawa Barat, namun mengalami tantangan serius akibat peningkatan volume sampah pesisir. Hasil penelitian Ziani (2022) menunjukkan bahwa kepadatan sampah di Teluk Pelabuhanratu mencapai 232 item/m² pada fase pasang purnama I dan meningkat menjadi 525 item/m² pada fase pasang purnama II, dengan dominasi kayu dan plastik sebagai komponen utama. Data ini mengindikasikan tingginya kontribusi sampah yang dibawa dari hulu sungai, aktivitas pariwisata, serta limbah rumah tangga yang tidak terkelola (Ziani, 2022).

Kondisi ini diperparah oleh dinamika alam, seperti pasang surut laut yang membawa limpahan sampah dari berbagai sumber, terutama melalui aliran Sungai Cimandiri yang menjadi jalur utama perpindahan sampah dari daratan ke pesisir. Temuan ini menguatkan bahwa pengelolaan sampah laut tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sampah darat yang efektif.

Gambar 1.1 Kepadatan dan Komposisi Sampah di Teluk Pelabuhanratu (2024)



Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sampah plastik mencapai hampir sepertiga dari total komposisi sampah pesisir, menjadikannya ancaman terbesar bagi ekosistem laut dan estetika kawasan wisata. Tingginya kandungan kayu menandakan kontribusi besar dari aktivitas perikanan dan bongkar muat di pelabuhan. Sementara

itu, plastik sekali pakai berasal dari konsumsi wisatawan dan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Dinamika pasang surut laut juga memengaruhi distribusi sampah, di mana peningkatan signifikan pada *Pasang Purnama II* menandakan bahwa arus laut membawa tambahan sampah dari muara sungai. *Zaini et al. (2022)* menegaskan bahwa Sungai Cimandiri menjadi salah satu jalur utama perpindahan sampah dari wilayah hulu ke pesisir, menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan antara pengelolaan sampah darat dan laut.

Walaupun *Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukabumi (2023)* telah menyediakan armada pengangkut, TPS, kontainer, serta dua TPA di Cibadak dan Jampangkulon, distribusinya belum menjangkau seluruh kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah, khususnya pada musim libur panjang. Selain keterbatasan infrastruktur, persoalan utama lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan belum adanya model kolaborasi lintas sektor yang konsisten (*Hadi, 2022*).

Dalam kerangka ilmu Administrasi Publik, konsep *collaborative governance* menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Menurut *Ansell dan Gash (2008)*, *collaborative governance* merupakan “*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*”

Dengan demikian, kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi merupakan proses deliberatif yang melibatkan berbagai aktor pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus dan hasil bersama.

Model ini menempatkan proses kolaboratif sebagai inti dari keberhasilan tata kelola. *Ansell dan Gash* mengidentifikasi lima indikator utama dalam proses kolaborasi yang saling berinteraksi secara dinamis:

1. *Face-to-Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Kolaborasi dimulai dari komunikasi langsung antar-aktor untuk membangun pemahaman bersama. Dialog tatap muka menjadi sarana utama dalam menyamakan persepsi, mengurangi konflik, serta membangun hubungan personal yang konstruktif.

2. *Trust-Building* (Membangun Kepercayaan)

Kepercayaan merupakan pondasi dari seluruh proses kolaboratif. Dalam konteks pengelolaan sampah pesisir, kepercayaan ini terbentuk melalui transparansi informasi, konsistensi kebijakan, dan keterlibatan nyata antar pemangku kepentingan. Proses ini memerlukan waktu dan kesinambungan agar partisipasi menjadi autentik, bukan sekadar simbolik.

3. *Commitment to Process* (Komitmen terhadap Proses)

Komitmen terhadap proses menuntut kesediaan semua pihak untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif tidak dapat dicapai apabila salah satu aktor pasif atau hanya terlibat secara formalitas. Pemerintah perlu menjadi *convener* atau fasilitator yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan membangun kesepahaman bersama tentang tujuan, permasalahan, dan solusi yang ingin dicapai. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini mencakup penyamaan pandangan antara aktor pemerintah, komunitas pesisir, dan pelaku usaha terhadap isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang saling terkait.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Jangka Menengah)

Hasil Jangka Menengah mencakup capaian-capaian kecil yang memperkuat kepercayaan dan motivasi antar aktor. Keberhasilan pada tahap ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan

proses kolaboratif dan mempercepat tercapainya tujuan jangka panjang, seperti pengurangan sampah pesisir dan perubahan perilaku masyarakat.

Kelima indikator ini membentuk siklus yang saling memperkuat. Dialog tatap muka yang terbuka memunculkan kepercayaan, kepercayaan mendorong komitmen, komitmen menghasilkan kesepahaman, dan kesepahaman melahirkan hasil-hasil antara yang menjadi dasar bagi kolaborasi berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *collaborative governance* digunakan untuk menelaah sejauh mana pemerintah daerah, masyarakat pesisir, sektor swasta, dan organisasi lingkungan di Pelabuhanratu mampu membangun proses kolaboratif yang mencerminkan kelima elemen tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menilai keterlibatan aktor, tetapi juga mengamati dinamika hubungan, komunikasi, dan kepercayaan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terbaru mendukung penerapan teori ini dalam konteks Indonesia. *Wartono dan Erison (2025)* menemukan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif di Lamongan berhasil menurunkan volume sampah plastik hingga 40% berkat sinergi antara pemerintah daerah, komunitas pesisir, dan pengusaha daur ulang. Sementara *Suputra dan Masrich (2025)* menunjukkan keberhasilan *Program Jembrana Kedas* di Bali melalui peran aktif masyarakat dan dukungan regulasi yang tegas. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* diyakini mampu menjadi dasar konseptual yang kuat dalam merumuskan solusi pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pelabuhanratu yang melibatkan multi-aktor secara partisipatif dan berkelanjutan.

Secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi dan implementasinya di kawasan pesisir Pelabuhanratu. Mayoritas kebijakan yang diterapkan masih bersifat sektoral dan top-down, belum sepenuhnya mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam perencanaan maupun pelaksanaan program lingkungan. Secara teoretis, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir masih terbatas. *La Ode Al Ihlas (2022)* dalam penelitiannya di Kabupaten Banyumas

menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kepemimpinan, dan kepercayaan antar-aktor. Namun, konteks pesisir memiliki dinamika yang berbeda karena melibatkan kepentingan ekonomi (pariwisata, perikanan) dan lingkungan sekaligus, sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif yang lebih adaptif dan berbasis lokalitas.

Maka, penelitian tentang “Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi” menjadi penting dan relevan untuk mengisi kekosongan kajian pada tingkat lokal sekaligus menguji penerapan teori *collaborative governance* dalam praktik pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pelabuhanratu merupakan isu strategis yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lingkungan. Melalui penerapan pendekatan *collaborative governance*, diharapkan tercipta mekanisme tata kelola pengelolaan sampah pesisir yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan mengacu pada lima indikator utama *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008), sebagai berikut:

1. Interaksi tatap muka antar-pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan lembaga lingkungan masih terbatas dan bersifat sporadis. Forum komunikasi yang seharusnya menjadi

ruang untuk menyamakan persepsi dan merumuskan solusi bersama belum berlangsung secara rutin dan terstruktur. Akibatnya, penyampaian aspirasi masyarakat dan koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan sampah belum optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak responsif terhadap kondisi lapangan.

2. Tingkat kepercayaan antar-aktor dalam proses pengelolaan sampah masih rendah. Masyarakat cenderung skeptis terhadap konsistensi kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program lingkungan. Kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai data dan hasil pengelolaan sampah turut memperlemah rasa saling percaya yang dibutuhkan dalam kolaborasi.
3. Komitmen aktor terhadap keberlanjutan proses kolaboratif masih lemah. Banyak inisiatif kolaboratif berhenti pada tahap awal karena minimnya tindak lanjut atau dukungan sumber daya. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme formal untuk memastikan keberlanjutan program, sementara partisipasi masyarakat dan sektor swasta masih bersifat insidental, muncul ketika ada proyek atau kegiatan tertentu.
4. Tidak semua pihak memiliki kesepahaman yang sama tentang pentingnya pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama. Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tugas pemerintah semata. Sementara itu, sektor swasta cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan pandangan ini menghambat terbentuknya visi kolektif dalam penanganan sampah di kawasan pesisir.
5. Capaian jangka menengah dari kolaborasi yang sudah berjalan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, kegiatan kampanye kebersihan atau pelatihan daur ulang yang dilakukan belum berkelanjutan dan belum mampu menurunkan volume sampah pesisir secara konsisten.

Hasil jangka menengah yang tidak optimal ini juga berdampak pada menurunnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kolaborasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang berfokus pada analisis penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dialog pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana membangun kepercayaan pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana komitmen terhadap proses pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana pemahaman bersama pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
5. Bagaimana hasil jangka menengah pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan lima indikator utama, dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk menjelaskan upaya membangun kepercayaan pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui komitmen terhadap proses pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman bersama pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
5. Untuk menguraikan bagaimana hasil jangka menengah pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai *Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi* diharapkan memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun praktis. Manfaat penelitian ini mencerminkan signifikansi akademik dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik dan signifikansi sosial bagi penguatan tata kelola lingkungan di tingkat daerah.

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan memperkaya khasanah ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang tata kelola lingkungan berbasis kolaboratif. Penelitian ini memperkuat dan mengadaptasi teori

Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, dengan menekankan pada lima indikator utama *dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil jangka menengah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model implementasi kebijakan lingkungan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah pesisir yang berbasis kolaborasi. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, membangun kepercayaan dengan masyarakat, serta memperbaiki efektivitas program lingkungan.
- b. Bagi Masyarakat dan Komunitas Pesisir Pelabuhanratu
Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara mandiri. Dengan memahami faktor-faktor kolaboratif yang berhasil, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat hubungan sosial dengan aktor pemerintah dan swasta.
- c. Bagi Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah (NGO)
Penelitian ini memberikan pemahaman strategis mengenai bagaimana sektor swasta dan NGO dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk membangun kemitraan yang produktif antara

pelaku usaha pariwisata, industri lokal, dan komunitas pesisir dalam menciptakan ekonomi sirkular yang ramah lingkungan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Secara praktis, penelitian ini menjadi referensi empiris dan metodologis bagi akademisi yang meneliti tata kelola lingkungan, kebijakan publik, atau pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian komparatif di daerah pesisir lain yang menghadapi persoalan serupa.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logika konseptual antara variabel yang diteliti, dimulai dari input (faktor penyebab dan kondisi awal), dilanjutkan dengan proses (mekanisme penerapan kolaborasi antaraktor), hingga output (hasil dan dampak dari kolaborasi dalam pengelolaan sampah). Kerangka ini menggunakan teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) sebagai landasan utama yang terdiri dari lima indikator, yaitu *Face-to-Face Dialogue*, *Trust-Building*, *Commitment to Process*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcomes*.

Tahapan *input* mencakup kondisi awal dan faktor yang melatarbelakangi permasalahan pengelolaan sampah di pesisir Pantai Pelabuhanratu. Faktor-faktor ini antara lain tingginya volume timbulan sampah plastik, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah. Selain itu, faktor sosial seperti kurangnya komunikasi lintas sektor dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menjadi titik awal untuk menilai sejauh mana kolaborasi lintas aktor telah terbangun dalam tata kelola pengelolaan sampah pesisir. Dalam konteks teori *Collaborative Governance*, tahap *input* ini mencerminkan kondisi struktural,

politik, dan sosial yang menentukan kesiapan aktor-aktor untuk berkolaborasi. Data dari *Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (2024)* menunjukkan bahwa kepadatan sampah di kawasan Teluk Pelabuhanratu mencapai 232-525 item/m² dengan dominasi plastik (31,52%), yang memperkuat urgensi perlunya kolaborasi efektif dalam pengelolaan sampah.

Tahapan *proses* menggambarkan dinamika interaksi dan hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah pesisir melalui penerapan lima indikator utama *Collaborative Governance*.

1. *Face-to-Face Dialogue*, proses komunikasi tatap muka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan sampah. Dialog ini menjadi wadah utama dalam membangun saling pengertian dan memperkuat koordinasi.
2. *Trust-Building*, upaya membangun kepercayaan antaraktor melalui transparansi informasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas kebijakan publik. Kepercayaan menjadi prasyarat agar seluruh pihak mau terlibat secara aktif dan konsisten.
3. *Commitment to Process*, menggambarkan sejauh mana aktor-aktor kolaboratif memiliki komitmen terhadap proses pengelolaan sampah. Hal ini meliputi kesediaan untuk terus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program lingkungan secara berkelanjutan.
4. *Shared Understanding*, terbentuknya pemahaman dan visi bersama di antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan dapat diterima semua pihak.

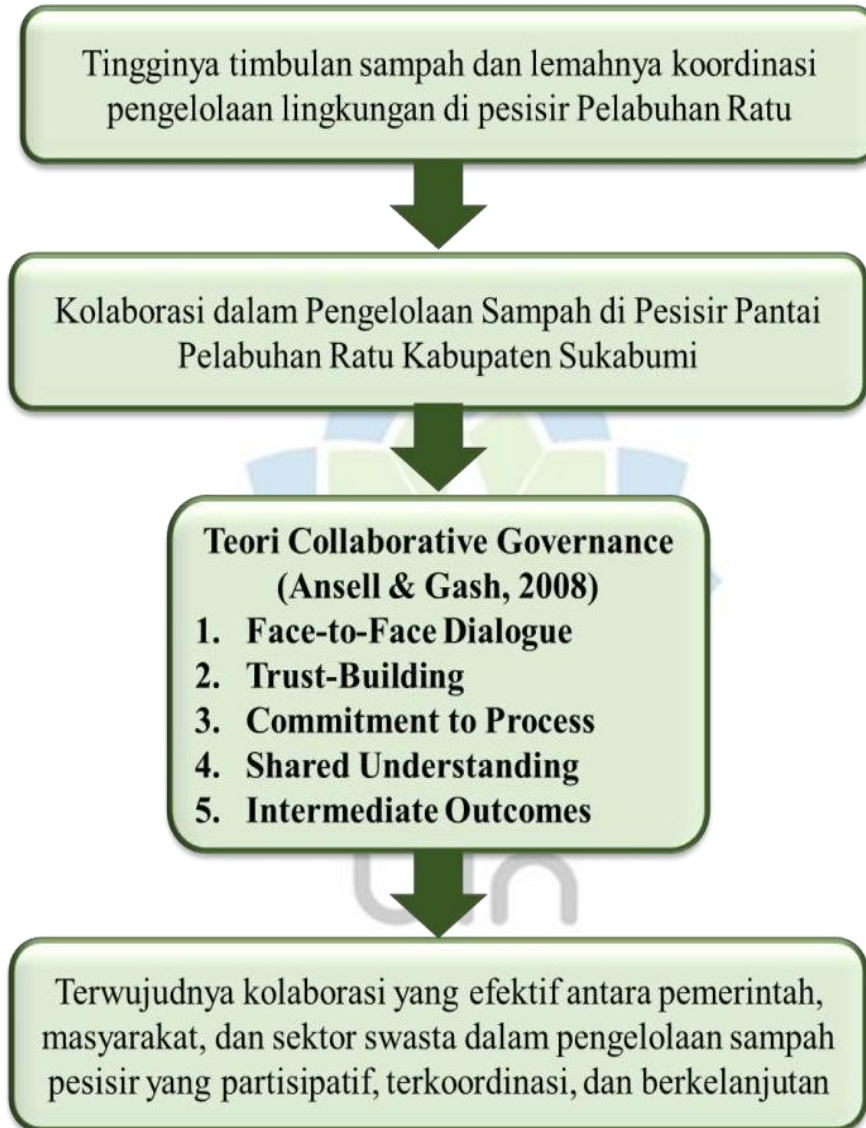
Dalam tahap ini, *Collaborative Governance* bekerja sebagai mekanisme interaktif di mana setiap aktor saling berkontribusi berdasarkan perannya. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaksana dan pengawas lingkungan, sementara sektor swasta berperan dalam inovasi dan dukungan sumber daya. Proses ini

diharapkan menghasilkan hubungan timbal balik yang kuat dan kolaboratif dalam pengelolaan sampah di pesisir.

Tahapan *output* dalam penelitian ini menggambarkan hasil yang diharapkan dari proses kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelabuhanratu. Melalui penerapan lima indikator *Collaborative Governance*, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman mengenai pola kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kebersihan pesisir. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan plastik sekali pakai. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai model kolaborasi yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif, serta mendorong terciptanya sinergi kelembagaan lokal yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara input, proses, dan output menunjukkan bahwa penerapan teori *Collaborative Governance* di Pelabuhanratu mampu mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan sampah yang lebih efisien, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2026